

RESPONS GEREJA TERHADAP persoalan FEMINISASI MIGRASI DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI PUBLIK

Benediktus Denar

STIPAS St. Sirilus Ruteng

Email: Bennydenar@yahoo.com

Jean Loustar Jewadut

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, Ledalero - Maumere

Email: jewadutj@gmail.com

Abstract

This article aims to explain the Church's response to the feminization of migration in the perspective of public theology. The production of a resounding narrative about migration that ensures easy access to finance contradicts to the reality marked by practices of injustice and violations of the dignity of migrants. This article is written using qualitative methods with a literature study approach. With this method, researchers collect and analyze data obtained from various sources such as articles, books, documents, newspapers, policies, and various results of previous research or studies. The results of this study show that in the face of the complexity of the feminization of migration, the Church must assert itself as a community of faith willing to take any risk in order to fight for the fate of migrants. The perspective of public theology contributes to strengthening the Church's response to the issue of the feminization of migration which does not only stop at prophetic appeals, but must also move further to concrete efforts, such as advocating migration policies and collaborating with certain parties to empower migrant women who have returned from overseas.

[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan respons Gereja terhadap feminisasi migrasi dalam perspektif teologi publik. Produksi narasi yang menggema mengenai migrasi yang memastikan akses mudah terhadap finansial bertentangan dengan realitas yang ditandai oleh praktik ketidakadilan dan pelanggaran terhadap martabat para migran. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dengan metode ini, para peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dokumen, surat kabar, kebijakan, dan berbagai hasil penelitian atau studi sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kompleksitas feminisasi migrasi, Gereja harus memperkuat dirinya sebagai komunitas iman yang bersedia mengambil risiko apa pun untuk berjuang demi nasib para migran. Perspektif teologi publik berkontribusi dalam memperkuat respons Gereja terhadap isu feminisasi migrasi yang

tidak hanya berhenti pada seruan kenabian, tetapi juga harus melangkah lebih jauh ke upaya konkret, seperti mengadvokasi persoalan kaum migran, dan bekerja sama serta membangun jejaring untuk memberdayakan perempuan migran yang telah kembali dari perantauan.]

Key words: *Church, feminization of migration, public theology, transformative diaconia*

A. PENDAHULUAN

Respons Gereja terhadap persoalan migrasi adalah kebutuhan urgent di tengah realitas meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam berbagai bentuk terhadap kaum migran. Gereja perlu terlibat aktif merespons persoalan migrasi, bukan saja karena migrasi menjadi persoalan kemanusiaan global yang mengundang aksi solidaritas universal, melainkan terutama karena migrasi berhubungan erat dengan hakikat misi Gereja di dunia (Febrianto, 2020). Bahkan, menurut Peter C. Phan, pada hakikatnya Gereja Katolik sangat akrab dengan migrasi sebab penyebaran Gereja Katolik didukung oleh proses migrasi: *extra migrationem nulla ecclesia* (Phan, 2016).

Akhir-akhir ini, migrasi yang kerap kali dinarasikan sebagai jalan yang memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi bagi kaum migran, dalam kenyataan justru memunculkan banyak masalah. Respons Gereja yang terwujud dalam karya pastoral harus mampu memperjuangkan nasib kaum migran agar terbebas dari jeratan dehumanisasi. Tentu karya pastoral Gereja di bidang migrasi perlu memiliki landasan argumentasi teologis yang kuat. Basis argumentasi teologis tersebut menjadi penuntun bagi karya pastoral Gereja agar semakin tepat sasaran dan berdaya membebaskan manusia dari penderitaan dalam segala macam bentuknya. Basis teologis tersebut juga amat penting agar umat beragama lain dapat memahami prinsip-prinsip teologis yang ada di balik karya pastoral Gereja dan sekaligus memotivasi mereka untuk bersama-sama menggalakkan solidaritas.

Salah satu akar masalah munculnya migrasi adalah krisis ekonomi. Sebagai contoh, banyak dampak negatif yang dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 silam. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami dampak dari krisis tersebut. Pengalaman krisis tersebut berimbas pada kenaikan jumlah pekerja migran asal Indonesia secara signifikan. Desakan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, mendorong tidak sedikit orang Indonesia merantau ke luar negeri. Pilihan untuk merantau dimotivasi pula oleh realitas minimnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Bukan hanya itu, persoalan migrasi juga mencakup banyak bidang kehidupan, yaitu bidang ekonomi, politik, keamaanan nasional, hak asasi manusia, hukum, dan wacana politik lainnya. Lebih dari itu, persoalan migrasi juga bersentuhan dengan aspek yang paling mendasar, yaitu martabat manusia. Jadi,



dapat dikatakan persoalan migrasi merupakan fenomena yang kompleks (Dian Permana, 2020).

Migrasi pekerja yang terjadi tidak saja melibatkan kaum pria, tetapi juga kaum perempuan. Secara kebetulan, krisis ekonomi yang ada, terjadi bersamaan dengan permintaan yang tinggi akan tenaga kerja perempuan. Mereka dikirim untuk bekerja di beberapa negara maju, antara lain di kawasan Asia Timur, sebab negara-negara di kawasan itu sedang terjadi gelombang kenaikan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Perempuan Indonesia dianggap dapat mengisi kekosongan tenaga kerja di sektor domestik rumah tangga (Aeni, 2019).

Sejak krisis yang terjadi tersebut, pilihan untuk menjadi pekerja migran perempuan terus bertambah. Kemendesakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong kaum perempuan keluar dari zona nyamannya. Namun demikian, alih-alih menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, migrasi pekerja tersebut malah menimbulkan masalah baru bagi kaum perempuan. Mereka antara lain kerap ditipu, dieksplorasi, didiskriminasi, dan mengalami kekerasan fisik-seksual maupun verbal.

Fenomena miris tersebut perlu mendapat perhatian serius, termasuk dari Gereja Katolik. Lebih-lebih, banyak juga kelompok imigran perempuan yang adalah umat Gereja Katolik, antara lain dari daerah-daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan jika mereka bukan orang Katolik, atas nama martabat manusia, Gereja mesti merespons persoalan tersebut. Gereja mesti melihat penderitaan kaum perempuan migran sebagai *locus berteologi* dan menjadi basis untuk menetapkan kebijakan pastoral di bidang migrasi. Hal itu berarti refleksi teologis yang dibuat mesti menyasar dan mengangkat suara-suara penderitaan kaum perempuan ke permukaan sehingga secara bersama dapat dicari jalan keluarnya dalam ranah praksis.

Dalam Pedoman Pastoral untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau tahun 2016 No. 21, Paus Yohanes Paulus II mengingatkan para anggota Dewan Komisi Katolik Internasional untuk Migrasi (*Council of International Catholic Migration Commission*) tentang jati diri kaum migran di satu sisi dan tentang tugas perutusan Gereja di sisi lain. Menurut Yohanes Paulus II, Yesus hadir secara nyata dalam diri para migran, dan setiap orang dipanggil untuk melihat Yesus dalam diri sesama yang melakukan pewartaan dan pembelaan terhadap martabat luhur kaum migran, juga mencakup sesama yang terlantar dan para pengungsi (Dewan Kepausan Untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau, 2016, p. 21). Artinya, menyembah Kristus berarti bersedia memberi diri membela nasib sesama, terutama mereka yang tertindas. Dalam nada yang sama, Paus Fransiskus mengkritik kebiasaan dan pola kerja Gereja yang memberikan perhatian lebih pada liturgi, doktrin, dan gengsi Gereja, tetapi tanpa perhatian apapun agar Injil memiliki dampak konkret bagi umat Allah dan kebutuhan konkret masa kini (Paus Fransiskus, 2013, No. 95).

Secara khusus, dalam seruan apostolik *Evangelii Gaudium* (Sukacita Injil) artikel 54, Paus Fransiskus membangkitkan kesadaran umat tentang situasi dunia yang sedang digerus oleh “globalisasi ketidakpedulian” yang berakibat pada

ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam penderitaan sesama (Paus Fransiskus, 2013). Menurut Paus Fransiskus, di tengah dunia yang diwarnai oleh globalisasi ketidakpedulian, Gereja mesti menampilkan diri sebagai persekutuan Umat Allah yang berciri misioner. Artinya, Gereja mesti melibatkan diri secara aktif dalam pergumulan hidup manusia. Paus Fransiskus lebih bersympati pada Gereja yang rapuh, terluka, dan kotor karena menceburkan diri ke jalan-jalan, ketimbang sebuah Gereja yang sakit lantaran tertutup dan mapan mengurus dirinya sendiri (Paus Fransiskus, 2013, No. 49). Artinya, definisi tentang eksistensi Gereja tidak mengacu pada otoritas sebagai institusi, tetapi pada keterlibatan praktis dalam kehidupan umat beriman.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pijakan bagi keterlibatan Gereja dalam merespons persoalan feminisasi migrasi serentak mendorong terwujudnya Gereja yang sinodal bagi kaum migran. Semua itu dikaji secara mendalam dengan bingkai konsep teologi publik. Teologi publik adalah teologi yang berusaha memberikan respons terhadap kehidupan publik dengan menjadikan pesan kenabian ajaran Yesus sebagai basis rujukan. Teologi publik menegasikan prinsip privatisasi ajaran agama hanya untuk kelompok tertentu. Sebaliknya, teologi publik berusaha mensasarkan ajaran agama pada kehidupan publik agar ajaran agama sungguh memiliki implikasi sosial-politis hidup beriman. Singkatnya, teologi publik terbuka untuk menginisiasi sikap kritis terhadap bahaya marginalisasi dan privatisasi iman dan teologi itu sendiri (Denar & Tolo, 2022).

Artikel ini berusaha menjawab dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana persisnya kompleksitas persoalan feminisasi migrasi? *Kedua*, bagaimana bentuk respons Gereja terhadap persoalan feminisasi migrasi dalam perspektif teologi publik? Dari rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan persoalan feminisasi migrasi; dan menjelaskan respons Gereja terhadap persoalan feminisasi migrasi dalam perspektif teologi publik.

B. METODE

Artikel ini ditulis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dengan metode tersebut, maka peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dokumen, surat kabar, kebijakan, dan berbagai hasil penelitian atau kajian terdahulu (Smith, 2023b). Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan interaksi langsung dengan partisipan atau subjek penelitian, tetapi mengandalkan informasi yang terdapat dalam dokumen atau berbagai literatur yang tersedia (Johnson, 2022). Hal ini memungkinkan peneliti dapat mengakses data yang luas dan menyeluruh tanpa harus terlibat langsung dalam situasi yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut (Smith, 2023a). *Pertama*, pengumpulan data. Peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. *Kedua*, seleksi dan pengorganisasian data. Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, peneliti



kemudian memilih dokumen yang paling relevan dan signifikan untuk penelitian. Data tersebut kemudian diorganisasi dan dikategorisasi agar mudah diakses saat analisis. *Ketiga*, analisis data. Di sini, peneliti menganalisis isi dokumen-dokumen tersebut untuk mencari pola, tema, atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti analisis isi atau analisis tematik. *Keempat*, interpretasi hasil. Setelah melakukan analisis, peneliti menafsirkan dan mengartikan data yang ditemukan untuk merumuskan kesimpulan atau temuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Persoalan Feminisasi Migrasi

Fenomena migrasi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya bukanlah sebuah fenomena mutakhir yang baru terjadi. Migrasi sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain (Badudu & Zain, 2001, p. 89). Kata migrasi beririsan dengan kata imigrasi yang diartikan sebagai perpindahan penduduk masuk ke negara lain dan menetap (Harahap, 1951, p. 137; Podo & Edarwati, 2013). Fenomena ini sudah terjadi sejak dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Akhir-akhir ini, fenomena migrasi telah menjadi sebuah tren dan jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam konteks global, IOM (*International Organization for Migration*) dalam pemberitaannya yang berjudul *World Migration Report 2022* mencatat total jumlah migran di seluruh dunia sebanyak 281 juta orang dan jumlah ini mencakup 3,6% populasi dunia (International Organization for Migration, 2022). Dalam skala nasional, tren migrasi juga telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik migrasi intern maupun migrasi ekstern. Sejak tahun 2009 hingga akhir tahun 2019, pertambahan jumlah penduduk di daerah perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2019, tingkat urbanisasi mencapai 55,99% (Christy, 2020). Untuk konteks Indonesia, mayoritas kaum migran adalah orang-orang yang ingin mencari pekerjaan di negara lain atau lebih akrab disebut sebagai kaum migran ekstern. Mereka disebut sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), di tahun 2014, dari total 429.872 TKI, sebanyak 57% adalah kaum perempuan dan sisanya adalah laki-laki (43%). Pada tahun selanjutnya, jumlah persentase ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2015-2016, meskipun jumlah total tenaga kerja mengalami penurunan, tetapi persentase kaum perempuan meningkat menjadi 60% (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Jadi, mayoritas TKI adalah kaum perempuan. Di tanah perantauan, kaum migran dituntut untuk bisa beradaptasi dengan situasi budaya baru yang diawali oleh perasaan ketertarikan dan antisipasi, diikuti oleh periode gegar (*shock*) dan disorientasi, kemudian secara bertahap beradaptasi dengan konteks budaya baru (Rahardjo et al., 2018).

Menurut Castles dan Miller, terdapat beberapa tren utama dalam migrasi internasional di antaranya globalisasi migrasi (ada lebih banyak negara yang terkena dampak perpindahan migrasi), diferensiasi migrasi (migran yang pindah ke satu negara berasal dari berbagai etnis dan kelompok), percepatan migrasi (tercerminkan dalam peningkatan volume migran), politisasi migrasi (kebijakan dalam negeri, hubungan bilateral dan regional, dan kebijakan keamanan nasional negara semakin dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang risiko migrasi internasional dan sebaliknya), dan feminisasi migrasi (migrasi yang dihubungkan dengan isu gender) (Castles & Miller, 1998, pp. 8–9). Tren utama dalam migrasi internasional yang dijelaskan oleh Castles dan Miller membantu dalam membuat analisis terhadap kompleksitas persoalan migrasi.

Everett E. Lee mengelompokkan dua faktor yang menyebabkan masyarakat bermigrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong masyarakat bermigrasi di antaranya ialah pendapatan yang rendah, kemiskinan, diskriminasi, ancaman terhadap kehidupan beragama, dan perubahan iklim. Sementara faktor penarik masyarakat bermigrasi di antaranya ialah pembangunan ekonomi yang menjanjikan di suatu wilayah, upah yang tinggi, jaminan keamanan, dan peluang yang lebih besar untuk mengakses lapangan kerja (Gurieva & Dzhioev, 2015).

Dalam konteks Indonesia, pekerja migran perempuan menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi negara (Ramadani, 2021). Namun, fakta positif tersebut tidak didukung oleh penghargaan terhadap martabat luhur pekerja migran perempuan. Padahal feminisasi migrasi merupakan salah satu kata kunci penting dalam memahami ciri-ciri migrasi terkini, yang mewakili situasi migrasi berbasis gender dan diskriminasi seksual (Kofman et al., 2020). Dalam proses ini, feminisasi migrasi merepresentasikan fakta bahwa jumlah pekerja migran perempuan meningkat pesat seiring percepatan kemiskinan keuangan perempuan. Selain itu, banyak perempuan yang melintasi batas untuk menekuni pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, yang dianggap sebagai pekerjaan tipikal perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa migran perempuan tidak hanya terpengaruh oleh lingkungan ekonomi dan sosial negara asal mereka, tetapi juga oleh kebijakan negara tuan rumah terkait dengan kondisi pasar tenaga kerja. Kenaikan jumlah migran perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi antarnegara dan wilayah menyulitkan hubungan gender, status, dan ras (Kofman et al., 2020).

Karakter migrasi perempuan juga merepresentasikan karakter migrasi secara umum, yaitu perubahan dari migrasi tenaga kerja temporal menjadi migrasi permanen, dari migrasi finansial menjadi migrasi sosial, dan dari migrasi temporer terutama para bujang menjadi migrasi permanen dengan kepemilikan tempat tinggal tetap dan pasangan hidup. Di sinilah timbul kebutuhan untuk menganalisis migrasi perempuan sebagai bidang independen yang terpisah dari migrasi laki-laki (Kofman et al., 2020). Inilah alasan yang membuat kita memusatkan perhatian pada fakta bahwa padahal sebelumnya migran perempuan hanya dianggap sebagai anggota keluarga



atau pendamping, sekarang mereka dianggap sebagai entitas independen yang bermigrasi dengan cara yang berbeda dari laki-laki (Kofman et al., 2020).

Feminisasi migrasi dengan orientasi pada migrasi ekonomi mampu memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan memiliki pendapatan sendiri yang membuatnya hidup mandiri dan mampu menopang ekonomi keluarga maupun masyarakat. Namun di balik catatan positif tersebut, kita juga mesti responsif terhadap catatan negatif seperti kerentanan perempuan migran terhadap berbagai persoalan, di antaranya tindakan kekerasan dan eksplorasi, dibandingkan laki-laki migran. Kasus seperti eksplorasi dan tindak kekerasan terhadap pekerja migran perempuan masih terus terjadi. Berbagai kasus dan tindak kekerasan yang sering kali terjadi adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual, jeratan utang, ancaman, pemerasan, pelanggaran hak atas informasi, manipulasi dokumen, pelanggaran kontrak kerja, tidak diberi upah, beban kerja yang berlebihan, dan meningkatnya kasus *human trafficking* (Kofman et al., 2020). Pada tahun 2016, Indonesia dilansir sebagai negara asal tenaga kerja dengan tingkat kasus *human trafficking* tertinggi di dunia. Dari berbagai kasus yang ada, 90% korban dialami oleh kaum perempuan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

Nur Ismi Ramdani dalam kajiannya tentang dampak psikologis perempuan pasca-migrasi menerangkan bahwa berbagai kasus dan tindak kekerasan yang dialami pekerja perempuan mengakibatkan munculnya pengalaman traumatis dan masalah psikologis yang mendalam seperti rasa cemas yang berlebihan, terintimidasi, inferior, malu, dan depresi (Ramadani, 2021). Tambahan pula, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kreativitas, dan kurangnya pengalaman perempuan migran mengantar mereka pada jeratan eksplorasi kerja, upah murah, diskriminasi, dan berbagai jenis kekerasan lainnya (Iswanti, 2011). Pekerja perempuan acapkali dibayar dengan upah rendah, yang bisa disebabkan oleh terjadinya diskriminasi terhadap mereka di bidang pendidikan. Terlambat sering kapabilitas perempuan diremehkan sebagai akibat dari diskriminasi kultural yang mewujud dalam pilihan untuk memprioritaskan laki-laki dalam mengakses pendidikan (Daven, 2023).

Dalam skala yang lebih kecil untuk konteks masyarakat Manggarai, faktor pendorong orang bermigrasi didasari oleh pandangan bahwa migrasi adalah jalan yang dapat ditempuh untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sementara faktor penarik orang bermigrasi ialah harapan bahwa peluang ekonomi di wilayah tujuan migrasi lebih menjanjikan ketimbang di kampung halaman sendiri (Yuliantari et al., 2020). Dalam catatan Sinode III (2013-2015) Keuskupan Ruteng, masalah yang muncul berhubungan dengan migrasi di antaranya ialah distorsi sosial (penyimpangan sosial) dan disintegrasi keluarga. Distorsi sosial tampak dalam kebangkrutan ekonomi, pegadaian tanah, kekurangan angkatan kerja produktif, penyebaran HIV, dan perdagangan manusia. Disintegrasi keluarga tampak dalam perzinahan, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran anak. Secara kultural, dalam konteks Manggarai, budaya *mbeot* (merantau), beban pesta, dan acara

adat turut menyebabkan terjadinya migrasi (Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017).

Respons Gereja terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi dalam Perspektif Teologi Publik

Perspektif teologi publik memberikan pendasaran teologis bagi perjuangan Gereja dalam merespons kompleksitas persoalan feminisasi migrasi. Berbasis teologi publik, Gereja mesti mengafirmasi peran publiknya dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan bersama seluruh umat beriman.

Mengenal Teologi Publik

Secara historis, terminologi teologi publik pertama kali digunakan oleh Martin Marty pada tahun 1974 untuk merespons konsep Robert Bellah tentang *civil religion* dalam konteks Amerika Serikat. Bellah menggambarkan filosofi nasional yang menggunakan beberapa bahasa dan simbol agama, namun tidak sektarian. Dalam tradisi Durkheim, Bellah menganggap bahwa agama sipil memberikan kohesi sosial dalam kelompok imigran bangsa yang beragam. Marty ingin menjelaskan tugas teologi publik dan membedakan lebih jauh teologi publik dari konstruksi agama sipil (Day & Kim, 2017).

Istilah teologi publik kemudian diadopsi oleh David Tracy dalam bukunya yang berjudul *The Analogical Imagination, Christian Theology and the Culture of Pluralism* yang terbit pada tahun 1981. Dalam buku tersebut, Tracy menganjurkan agar para teolog melepaskan diri dari partikularitas melalui diskursus teologi publik yang mengartikulasikan klaim kebenaran religius (Tracy, 1981, p. 3). Perspektif teologi publik mengajak Gereja untuk mengeluarkan teologi dari tendensi privatisasi iman (Denar, 2021). Artinya, teologi mesti peka terhadap isu-isu publik dan membangun diskursus tentang wacana-wacana publik. Wacana dan pengalaman publik bisa menjadi sumber dan lokus berteologi. Dengan demikian, teologi publik menjadi sebuah bentuk teologi praktis yang tidak hanya merefleksikan Allah, tetapi menghubungkan Allah dengan realitas kehidupan publik sehingga praktik-praktik yang buruk bisa direvisi (Cartledge, 2017).

David Tracy menjelaskan tiga kategori publik dalam konteks teologi publik, yaitu masyarakat, akademi, dan Gereja. *Pertama*, masyarakat dalam pemahaman Tracy, mencakup tiga ranah penting, yaitu ranah teknno-ekonomi, ranah politik, dan ranah kultural. *Kedua*, akademi menggambarkan lokus sosial tempat berlangsungnya studi teologi. *Ketiga*, Gereja adalah komunitas moral dan religius tempat para teolog mengimplementasikan ajaran teologi (Tracy, 1977; Tracy, 1981).

Teologi publik berurusan dengan cara memahami metodologi baru, tugas, cara, mode, gaya, tempat yang berbeda di ruang publik, dan konteks “publik” yang berbeda untuk dihubungkan. Teologi publik dapat berkontribusi pada refleksi teologis terutama bukan dengan menciptakan hermeneutika teologis atau alkitabiah yang



baru, juga tidak menyarankan sistematika yang baru dalam diskursus teologis, tetapi dengan menemukan jalan-jalan sehingga teologi pembebasan (dalam beberapa dimensinya yang berbeda) dapat dilakukan dalam masyarakat yang berbeda dengan tantangan yang berbeda pula (Gustavo & Buttelli, 2012).

Felix Wilfred, seorang profesor di Universitas Madras-India, dalam sebuah konferensi internasional di Fakultas Teologi di Universitas Sanata Dharma pada 2019 lalu memperkenalkan gagasan tentang teologi publik Asia. Menurut Wilfred, tugas teologi bukan hanya sekadar mempelajari proposisi atau interpretasi atas iman. Hakikat teologi inilah yang dipakai Wilfred untuk menentukan metode yang cocok bagi teologi Asia, yaitu metode dialogal yang berorientasi pada transformasi. Hal tersebut berarti bahwa teologi Asia tidak hanya bertugas untuk mengkomunikasikan kebenaran iman, tetapi mesti mampu berdialog dengan dunia yang lebih luas.

Keterbukaan untuk berdialog dengan dunia yang lebih luas menjadikan teologi publik sebagai sebuah teologi lintas batas (Wilfred, 2020). Teologi publik mengantar Gereja kepada keberanian untuk bertindak *ad extra*. Artinya, Gereja harus mengarahkan perhatian kepada perkara-perkara *societas* dan pada gilirannya harus pula bertanya kepada diri sendiri apa yang bisa dikontribusikan kepada *societas* dari sudut pandang imannya (Riyanto, 2021). Dalam menjalankan metode dialog yang mesti berorientasi pada transformasi, teologi tidak bisa berjalan sendiri. Pendekatan yang mesti digunakan adalah pendekatan interdisipliner (Pilario, 2020).

Wilfred membuat perbedaan teologi publik dengan beberapa bentuk teologi lainnya. *Pertama*, perbedaan *theology for public life* (teologi untuk kehidupan) dan *public theology* (teologi publik). Dari segi metodologis, dalam teologi untuk kehidupan publik, teologi sudah dibuat dan kemudian diterapkan dalam kehidupan publik. Meskipun berbicara tentang isu-isu di dunia di luar Gereja, namun semua itu dibuat untuk konsumsi internal pihak Gereja. Hal ini dapat dijelaskan secara signifikan oleh fakta teologi klerikalisis yang melihat masalah yang terjadi di tengah umat dari perspektif kaum klerus. Solusinya adalah membumikkan teologi de-klerikalisis: teologi tidak lagi membangun diskursus sesuai yang dikondisikan dunia klerus, tetapi benar-benar menjadi wacana tentang Tuhan dalam hubungannya dengan dunia. Berbeda dengan teologi untuk kehidupan, teologi publik berusaha membangun analisis komprehensif terkait masalah publik selalu dalam hubungan dengan pihak lain yang didasarkan pada hakikat Kerajaan Allah yang tidak memiliki batas (mencakup semua atau inklusif) (Wilfred, 2020).

Kedua, teologi publik terkait tetapi berbeda dengan teologi pembebasan. Motivasi praksis pembebasan yang digunakan teologi pembebasan berakar pada iman Kristen dan metodologi serta alat analisis pada umumnya bersifat Marxian. Teologi publik menggabungkan perhatian teologi pembebasan, tetapi pendekatannya jauh lebih komprehensif dan premisnya terletak pada jenis hubungan antara agama dan kebaikan bersama (Wilfred, 2020). Teologi publik merupakan sebuah usaha mengkonstruksi metode baru yang berhubungan dengan persoalan dan analisis

terhadap persoalan dengan pendekatan aneka ilmu (interdisipliner). Konsekuensinya, teologi masa lalu perlu direvisi secara holistik dalam konteks globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang jauh berbeda dari zaman sebelumnya.

Sebastian Kim, teolog Korea, menjelaskan bahwa teologi publik memiliki beberapa penekanan penting (Kim, 2017). *Pertama*, tujuan utama dari keterlibatan teologis adalah untuk menantang semua jenis monopoli dalam kehidupan publik dan mencari masyarakat yang lebih adil dan lebih terbuka dengan menggunakan advokasi, dialog kritis, dan debat. Sikap teologi publik terhadap sistem yang ada bukanlah berarti sistem itu jahat atau sepenuhnya salah. Dalam hal metode keterlibatan, teologi publik mengambil posisi reformasi ketimbang posisi revolusi.

Kedua, teologi publik mencoba menciptakan landasan dan metodologi yang sama untuk terlibat dalam isu-isu publik dengan berbagai mitra percakapan di ruang publik. Hal ini tidak berarti bahwa teologi kehilangan identitas atau kekhasan Kristen, tetapi sambil mempertahankannya, secara aktif mencari solusi bersama sehingga wawasan teologis tidak akan dikecualikan dalam percakapan publik. Tujuannya adalah terbentuknya masyarakat yang adil dan terbuka serta mewujudkan kebaikan bersama untuk semua.

Ketiga, teologi publik menganggap Gereja sebagai katalisator untuk advokasi dan keterlibatan sipil serta bekerja sama terutama dengan masyarakat sipil dan komunitas keagamaan lainnya dengan menggunakan penyelidikan kritis, debat terbuka, dan politik konsensus. Di sini, aspek sinodalitas Gereja sangat ditekankan dalam memperjuangkan keadilan dan kebaikan bersama.

Keempat, penekanan teologis teologi publik adalah Kerajaan Allah dan keterlibatan Allah dalam hikmat dan sistem manusia. Teologi publik bekerja sama dengan disiplin etika sosial Kristen dan filsafat politik.

Teologi publik memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan teologi politik. Max L. Stackhouse membuat perbedaan antara agama sipil, teologi politik, dan teologi publik. Menurut Stackhouse, agama sipil seringkali merupakan bentuk perayaan patriotik di Barat dan secara khusus di Amerika Serikat, sering diekspresikan dalam istilah kekristenan. Cacatnya terletak pada kurangnya referensi transendental. Sementara teologi politik berusaha memenuhi kekurangan tersebut dengan membawa disiplin ilmu teologi dan pemikiran kritis ke dalam relasi antara politik dan agama. Namun, teologi politik terlalu sering menyamakan atau mereduksi publik menjadi partisan atau alamat kebijakan pemerintah, dan memahami negara sebagai institusi yang memahami dan membimbing semua bidang kehidupan masyarakat lainnya. Teologi publik berusaha memperbaikinya dengan menegaskan bahwa lembaga-lembaga masyarakat sipil mendahului rezim, baik dalam urutan kejadian maupun berdasarkan hak, dan menegaskan bahwa teologi, dalam dialog dengan bidang pemikiran lain, membawa sumber daya yang sangat diperlukan untuk membentuk, mengatur secara etis, dan membimbing lembaga-lembaga tersebut secara moral (Stackhouse, 2004).



Joas Adiprasetya menjelaskan keterlibatan teologi publik sebagai keterlibatan simbolis. Karakter keterlibatan secara inheren terdapat dalam teologi itu sendiri, sedangkan watak simbolis mengacu pada aspek relasional. Teologi publik dengan aksentuasi pada keterlibatan simbolis berdampak pada tugas Gereja dalam menghubungkan iman kepada Allah dengan keterlibatan praksis di ruang publik untuk merespons isu-isu publik (Adiprasetya, 2022). Khusus untuk Indonesia, menurut Adiprasetya, teologi publik bersifat kontekstual. Teologi publik dalam konteks Indonesia kontemporer harus selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu *pertama*, pengalaman ketidakadilan yang dialami secara massif pada masa pemerintahan Soeharto dan *kedua*, konsep jawasentris yang memarginalkan budaya-budaya lain (Adiprasetya, 2013). Dalam ranah publik, teologi publik mengemban tiga tugas, yaitu profetis, proflektif, dan proleptis. Tugas profetis untuk memberikan penilaian kritis; tugas proflektif berorientasi pada aksi solidaritas kepada sesama yang menderita; dan tugas proleptis untuk menghadirkan pengharapan yang didasarkan pada karya Allah (Adiprasetya, 2022).

Metode yang digunakan oleh teologi publik adalah *to see* (melihat/mengamati), *to judge* (menilai), dan *to act* (bertindak). Aspek *to see* menggarisbawahi tugas seorang teolog untuk menyimak, mendengarkan, dan mempelajari semua persoalan konkret dalam ruang publik. Hasil *to see* kemudian dianalisis, dinilai, dan dikritik dari sisi Kitab Suci, tradisi, dan ajaran Gereja. Hasil *to judge* diimplementasikan dalam program pastoral yang transformatif. Program-program tersebut diaktualisasikan secara sungguh-sungguh (Riyanto, 2020). Teologi publik menjalankan peran profetik yang mesti didasarkan pada analisis sosial. Hasil analisis sosial mesti diterangi oleh Kitab Suci untuk mengetahui cara bagaimana relasi-relasi sosial dikonstruksi (Resane, 2019).

Diakonia Transformatif: Upaya Menjadi Gereja Sinodal bagi Kaum Migran

Teologi publik dapat dijadikan basis teologis bagi perjuangan Gereja dalam merespons persoalan feminisasi migrasi. Teologi publik dipahami sebagai dialog antara Kitab Suci dan tradisi di satu sisi, dengan pengalaman kehidupan nyata umat Allah di sisi lain. Pandangan tersebut memotivasi kita untuk menyadari bahwa kita tidak dapat berteologi seolah-olah kita hidup di dunia abstrak atau sudut sejarah yang mati. Sebaliknya berteologi berarti melibatkan diri secara aktif dalam dunia nyata. Dalam hubungan dengan pengalaman penderitaan kaum migran perempuan, teologi publik memberikan konsientisasi bahwa ketidakadilan bukanlah nasib atau takdir, melainkan disebabkan oleh tindakan orang atau struktur, dan karena itu, perlawanannya pun membutuhkan aksi bersama yang progresif.

Dalam perspektif teologi publik, penguatan diri sebagai Gereja yang sinodal sangat urgen dalam merespons persoalan feminisasi migrasi. Pada prinsipnya, Gereja yang sinodal hendak mengafirmasi *modus vivendi* (cara hidup) dan *modus operandi* (cara bergerak) segenap Umat Allah sebagai sebuah persekutuan yang tampak secara

jelas ketika semua anggotanya berjalan bersama, bertemu bersama dalam pertemuan, dan memberi diri secara total dalam pelaksanaan misi penginjilan (Jehaut, 2022; Nampar, 2022; Gaut, 2023). Di hadapan persoalan feminisasi migrasi, semua umat Allah mesti mampu berjalan bersama untuk memperjuangkan nasib kaum migran perempuan.

Teologi publik berkontribusi untuk memperkuat karya diakonia bagi kaum migran perempuan. Dengan menggunakan metode teologi publik, terbuka kemungkinan bagi Gereja untuk menyatakan preferensi seperti yang didalilkan oleh teologi public, yakni membangun wacana dan mengusahakan praksis demi keadilan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya, penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam meneliti penyebab ketidakadilan tentu sangat membantu Gereja untuk memahami pengalaman penderitaan kaum migran perempuan sebagai akibat dari ketimpangan struktur. Dalam hal ini, penerimaan realitas konkret dalam bentuk pengalaman penderitaan kaum migran perempuan sebagai alat yang sah dalam teologi telah memungkinkan suatu terobosan. Kaum migran perempuan tidak lagi harus menerima bahwa keterbatasan yang ditempatkan pada mereka dan ketidakadilan dalam hidup mereka adalah karena kehendak Tuhan. Sebaliknya, kita dapat sampai pada pemahaman bahwa ketidakadilan adalah produk manusia dan membutuhkan aksi perlawanan yang progresif.

Teologi publik menyadarkan Gereja akan tugasnya untuk melanjutkan karya publik Yesus yang bercorak diakonia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, keberadaan dan peran Gereja di dunia berciri misioner. Gereja ada karena misi Tuhan yang memiliki rencana baik bagi seluruh umat manusia. Atas dasar itu, sering dikatakan bahwa bukan Gereja yang memiliki misi, melainkan misi yang memiliki Gereja. Gereja menjadi sarana pelaksanaan *missio Dei* (misi Tuhan). Misi bukan usaha untuk mengristenkan orang. Gereja yang bermisi berarti Gereja yang memberikan kesaksian hidup. Pemberian kesaksian hidup berarti penentuan sikap Gereja untuk menunjukkan keberpihakan pada para penderita dan berusaha mengurangi penderitaan mereka sekalipun cara hidup alternatif seperti itu tidak diimbali dengan keuntungan politis atau ekonomis (Buru, 2022).

Berhadapan dengan persoalan feminisasi migrasi, Gereja dipanggil untuk turut serta mengambil bagian dalam segala daya upaya mengatasinya. Penderitaan yang dialami oleh kaum migran khususnya kaum migran perempuan harus dipandang sebagai sebuah seruan etis yang menuntut Gereja untuk membantu mereka keluar dari situasi penderitaan yang sedang mereka alami. Penderitaan kaum perempuan migran hendaknya menjadi sumber berteologi. Mengutip Paus Fransiskus, setidaknya ada tiga alasan sekaligus jalan yang menuntut dan menuntun Gereja dalam menaruh kepedulian terhadap para migran (Dian Permana, 2020). *Pertama*, misi pewartaan Injil yang ditujukan kepada seluruh dunia. Dalam hal ini, kaum migran merupakan salah satu subjek tujuan pewartaan Injil, di mana Gereja hadir untuk membawa warta kabar



sukacita yang membebaskan manusia dari situasi penderitaan yang sedang mereka alami.

Kedua, Gereja harus bekerja sama dengan negara-negara agar para migran bisa mendapatkan pendampingan yang jelas dan sesuai dengan kaidah kemanusiaan yang berlaku. Hal ini berarti Gereja harus membuka diri dalam relasi kritis-progresif dengan negara agar pendampingan terhadap kaum migran berjalan efektif dan efisien. Dalam konteks Indonesia, bentuk kerja sama dalam penanganan pengungsi dan migran telah terlihat dalam wujud kehadiran Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melalui pernyataannya agar pihak TNI, lembaga keagamaan dan masyarakat bersama-sama memberikan perhatian dan dukungan bagi para pengungsi; hadirnya lembaga JPIC-OFM Indonesia yang berjejaring dengan lembaga yang khusus mengurus pengungsi seperti JSR (*Jesuit Refugee Service*) dan komisioner tinggi PBB untuk pengungsi, yakni UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) (Dulmin, 2016; Sinaga, 2023).

Ketiga, kaum migran merupakan kelompok yang rentan karena terdiri atas orang-orang miskin, lemah, dan tidak berdaya yang membutuhkan perlindungan. Di hadapan penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan migran, Gereja harus mampu tampil seperti Yesus yang hadir membawa penghiburan, kabar baik bagi yang miskin, memberitakan pembebasan bagi yang tertawan, membebaskan orang-orang yang tertindas (Bdk. Luk 4:18-19; Yes 61:1-2).

Gereja mesti merespons realitas feminisasi migrasi dengan menggalakkan diakonia transformatif. Diakonia transformatif adalah pengembangan misi pembebasan yang dilakukan Gereja dalam konfrontasi dengan realitas sosial untuk memperjuangkan hak-hak hidup kelompok rentan, termasuk kaum perempuan migran (Para et al., 2021). Perwujudan iman baru sempurna ketika Gereja terlibat aktif dalam membongkar struktur sosial-politik dan sosial-budaya yang menindas kaum perempuan migran di tanah perantauan. Artinya, definisi tentang eksistensi Gereja tidak mengacu pada otoritasnya sebagai institusi, tetapi pada keterlibatan praksis untuk membela kaum perempuan migran yang menderita.

Gereja mesti memasukkan keadaan hidup kaum perempuan migran ke dalam diskusi, debat, penelitian, dan evaluasi pastoral tingkat paroki maupun keuskupan. Gereja, melalui para agen pastoral, perlu memasukkan tantangan, kegembiraan, harapan, dan bahkan kritik dari kaum perempuan migran ke dalam diskusi, debat, dan refleksi teologis-pastoral (Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng, 2017). Selain itu, Gereja melalui para pelayan pastoral mesti melakukan katekese tentang migrasi dan masalah-masalah yang timbul dari migrasi kepada umat.

Kami menawarkan dua bentuk diakonia transformatif sebagai respons terhadap persoalan feminisasi migrasi. *Pertama*, advokasi kebijakan pemerintah terkait kebijakan perlindungan terhadap kaum perempuan migran mulai dari keberangkatan, hidup di tanah rantau, hingga kepulangan ke wilayah sendiri. Diakonia transformatif dengan menempuh jalur advokasi tidak cukup hanya mengandalkan militansi atau

spiritualitas, tetapi juga harus dilengkapi modal pengetahuan, kekritisan, dan data yang akurat. Sebelum sampai pada langkah advokasi, para agen pastoral perlu turun ke lapangan untuk melihat secara analitis, menimbang secara teologis, dan bertindak secara pastoral atau politik untuk memperjuangkan hidup kaum perempuan migran.

Kedua, terinspirasi dari Letty M Russel, seorang teolog feminis yang melahirkan sebuah konsep tentang Gereja yang disebut sebagai *Hot House Ecclesiology*, Gereja dalam kerja sama dengan pihak yang berkendak baik perlu membangun sebuah tempat khusus untuk menampung korban perempuan migran sehingga perasaan trauma akibat kekerasan dalam berbagai bentuk di tanah perantauan bisa disembuhkan. *Hot House Ecclesiology* sendiri merupakan konsep yang lahir dari gerakan sekelompok wanita Jepang yang membangun sebuah rumah bagi anak-anak dan ibu yang menjadi korban keracunan timbal salah satu perusahaan di Jepang. Tujuan dibangunnya tempat ini adalah agar menjadi rumah atau tempat perlindungan yang aman, nyaman, damai dan tenteram bagi semua korban (Russell, 2001).

D. PENUTUP

Pandangan misoginis tentang perempuan yang cocok bekerja hanya dalam ranah privat rumah tangga dilawan oleh pihak perempuan sendiri dengan cara keluar dari rumah untuk merantau, mencari kerja ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Kenyataan seperti ini seakan membangkitkan harga diri perempuan. Perempuan memproklamasikan diri bahwa mereka juga bisa menjadi seperti laki-laki yang pergi merantau dan memperoleh penghasilan sendiri. Berkat merantau, kaum migran perempuan bisa memiliki pendapatan sendiri yang membuat mereka hidup mandiri dan mampu menopang ekonomi keluarga maupun masyarakat. Namun, di balik catatan positif tersebut, kita juga mesti responsif terhadap catatan negatif seperti kerentanan perempuan migran terhadap berbagai persoalan, di antaranya tindakan kekerasan dan eksplorasi.

Penderitaan kaum migran perempuan sudah sepantasnya menjadi sumber berteologi. Dalam hal ini, teologi bukan hanya sekadar sebuah ilmu yang mendiskusikan Tuhan terlepas dari situasi konkret umat beriman. Teologi mesti berdimensi publik; artinya perbincangan seputar Tuhan harus memiliki relevansi sosial terhadap kehidupan umat beriman. Teologi publik memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap persoalan publik dan selanjutnya dijadikan sebagai basis refleksi teologis untuk menemukan aksi bersama.

Teologi publik memandang Gereja sebagai sebuah komunitas beriman yang tidak hanya tahu berdoa, tetapi juga peka terhadap penderitaan sesama sebagai dampak ketimpangan struktur. Di hadapan persoalan feminisasi migrasi, eksistensi dan peran publik Gereja diuji, sejauh mana Gereja bertindak *ad extra* untuk memperjuangkan nasib kaum migran perempuan. Berbasis teologi publik, Gereja mesti mempertegas dimensi sinodalitasnya yang nyata dalam aksi bersama melakukan advokasi kebijakan pemerintah terhadap kaum migran, melakukan katekese tentang



migrasi, dan membantu menyembuhkan beban psikologis eks migran. Tegasnya, pesan publik teologi mesti mewujud dalam program dan praksis pastoral migrasi yang menjawabi persoalan umat.

REFERENSI

- Adiprasetya, J. (2013). In Search Of A Christian Public Theology In The Indonesian Context Today. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 12(1), 103–124. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i1.121>
- Adiprasetya, J. (2022). Nabi dan Sahabat: Teologi Publik sebagai Keterlibatan Simbolis. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 5(2), 283–299. <https://doi.org/10.34307/b.v5i2.413>
- Aeni, N. (2019). Pengambilan Keputusan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Perempuan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 15(2), 107–120. <https://doi.org/10.33658/jl.v15i2.151>
- Badudu, J. S., & Zain, S. M. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Buru, P. M. (2022). Misi Gereja Sinodal: Partisipasi dalam Missio Dei untuk Membangun Communio. *Mirifica.Net*. <https://www.mirifica.net/misi-gereja-sinodal-partisipasi-dalam-missio-dei-untuk-membangun-communio>
- Cartledge, M. J. (2017). Can Theology be 'Practical'? Part I: A Discussion of Theory, Practice, Wisdom, Spirituality and Context. *Journal of Empirical Theology*, 1(3), 5–19.
- Castles, S., & Miller, M. J. (1998). *The Age of Migration International Population Movements in the Modern World* (Second Edi). MACMILLAN PRESS LTD Hounds Mills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and London Companies and representatives throughout the world.
- Christy, F. E. (2020). Urbanisasi Indonesia 10 tahun Terakhir. *Tempo.Co*. <https://data.tempo.co/data/805/urbanisasi-indonesia-10-tahun-terakhir>
- Daven, M. (2023). Globalisasi dan Pariwisata sebagai Fenomena Kebudayaan. In M. Chen & F. Nala (Eds.), *Peziarah di Bumi, Gereja dan Pariwisata Holistik* (pp. 175–212). Obor.
- Day, K., & Kim, S. (2017). Companion to Public Theology: Introduction. In S. Kim & K. Day (Eds.), *Companion to Public Theology* (pp. 1–21). Brill.
- Denar, B. (2021). Jejak Kolonialistik Pariwisata Super Premium dan Peran Publik Teologi di Keuskupan Ruteng. In *Teologi Publik: Sayap & Metodologi* (pp. 239–262). Kanisius.
- Denar, B., & Tolo, P. (2022). Teologi Publik dan Praksis Pengembangannya dalam Pastoral Pariwisata di Keuskupan Ruteng. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutral*, 11(2), 30–45.

- Dewan Kepausan Untuk Reksa Pastoral Migran dan Perantau. (2016). Menyambut Kristus Kristus dalam Diri Pengungsi dan Orang yang Terpaksa Mengungsi (Pedoman Pastoral). In *Dewan Kepausan Cor Unum*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Dian Permana, A. (2020). Paus Fransiskus Merangkul Liyan. *Jurnal Teologi*, 09(01), 11–26. <https://doi.org/10.24071/jt.v9i01.2514>
- Dulmin, V. (2016). Membangun Pastoral Pengungsi. *JPIC-OFM Indonesia*. <https://jpicofmindonesia.org/2016/06/membangun-pastoral-pengungsi/>
- Febrianto, M. D. (2020). Berteologi Multidisipliner dan Interkultural di Zaman Migrasi. *Jurnal Teologi*, 09(01), 49–68. <https://doi.org/10.24071/jt.v9i1.2515>
- Gaut, W. (2023). Steep Path Toward a Synodal Church. *International Journal of Asian Christianity*, 6, 99–121. <https://doi.org/10.1163/25424246-06010006>
- Gurieva, L. K., & Dzhioev, A. V. (2015). Economic Theories of Labor Migration. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 101–109. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s7p101>
- Gustavo, F., & Buttelli, K. (2012). Public Theology as Theology on Kairos: The South African Kairos Document as a Model of Public Theology. *Southern Africa*, 143(July), 90–106.
- Harahap, E. St. (1951). *Kamus Indonesia* (Kesembilan). G. Kolf & Co.
- International Organization for Migration. (2022). World Migration 2022: Migration and Migrants: A Global Overview. *IOM UN Migration*. <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022-chapter-2>
- Iswanti. (2011). Lantunan Magnificat Maria Tere, Perjumpaan Teologi Feminis dengan Perempuan Flores dan NTT. In P. B. Kleden & R. Mirsel (Eds.), *Menerobos Batas Merobohkan Prasangka* (pp. 263–286). Ledalero.
- Jehaut, R. (2022). Membedah Diskursus Sinodalitas Paus Fransiskus dan Relevansinya terhadap Kehidupan Menggereja di Indonesia. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 105–117.
- Johnson, A. (2022). Metode Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif: Membuka Jendela Wawasan Tanpa Interaksi Langsung dengan Partisipan. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 18(3), 201–220.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://djsn.go.id/storage/app/media/ RPJM/BUKU I RPJMN 15-2019>
- Kim, S. (2017). Mission's public engagement: The conversation of missiology and public theology. *Missiology: An International Review*, 45(1), 7–24. <https://doi.org/10.1177/0091829616680650>
- Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram, P., & Sales, R. (2020). *Gender and international migration in Europe: Employment, Welfare, and Politics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203976265-5>
- Nampar, H. D. N. (2022). Menuju Gereja yang Sinodal: Memahami Gagasan



- Sinodalitas Sebagai Cara Hidup dan Cara Bergerak Gereja di Milenium Ketiga. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 176–190. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i2.294.176-190>
- Panitia Sinode III Keuskupan Ruteng. (2017). *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng Pastoral Kontekstual Integral*. asdaMEDIA.
- Para, N. D., Tari, E., & Ruku, W. F. (2021). Peran Gereja dalam Transformasi Pelayanan Diakonia. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.46445/jtki.vii2.310>
- Paus Fransiskus. (2013). *Evangeli Gaudium*. Dokpen KWI.
- Phan, P. C. (2016). Deus Migrator - God the Migrant: Migration of Theology and Theology of Migration. *Theological Studies*, 77(4), 845–868. <https://doi.org/10.1177/0040563916666825>
- Pilario, D. F. E. (2020). Interdisciplinary Perspectives and Approaches in Theologizing in Asia. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 1(1), 29–42. <https://doi.org/10.47043/ijipth.viii.4>
- Podo, S. P. H., & Edarwati, S. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Baru). Media Pustaka Phoenix.
- Rahardjo, T., Dwiningtyas, H., & Pradekso, T. (2018). Komunikasi “Penyesuaian Diri Kembali” Pekerja Migran Perempuan yang Kembali ke Daerah Asal. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 817. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.308>
- Ramadani, N. I. (2021). Dampak Psikologis Pengalaman Kerentanan yang Dialami Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus pada Kantong Buruh Migran di Kota Makassar. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(1), 15–32. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.4219>
- Resane, K. T. (2019). Response of Public Theology to the Voice of the Voiceless in Pluralistic South Africa. *Verbum et Ecclesia*, 40(1), 2–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/ve.v40i1.2006>
- Riyanto, F. E. A. (2020). *Metodologi, Pemantik & Anatomi RIset Filosofis Teologis*. Widya Sasana Publication.
- Riyanto, F. E. A. (2021). Berteologi di Ruang Inklusif, “Sayap” Metodologi Felix Wilfred. In F. E. A. Riyanto (Ed.), *Teologi Publik, Sayap, Metodologi, dan Praksis* (pp. 39–62). Kanisius.
- Russell, L. (2001). Hot-House Ecclesiology (A Feminist Interpretation on the Church. *The Ecumenical Review*, 53, 48–56.
- Sinaga, L. (2023). Teologi Migrasi dan Diakonia Transformatif: Sebuah Tawaran Berteologi Merespons Realitas Migrasi di Era Globalisasi. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7(2), 610–626. <https://doi.org/10.30648/dun.v7i2.750>
- Smith, J. (2023a). Langkah-langkah dalam Penelitian Kualitatif: Metode Studi Dokumen. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 20(1), 45–67.
- Smith, J. (2023b). Metode Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kepustakaan:

- Mengumpulkan dan Menganalisis Data dari Berbagai Sumber. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 20(2), 78–95.
- Stackhouse, M. L. (2004). Political Theology (print) ISSN 1462-317X Political Theology (online) Revised AAR presentation. *Journal of Public Theology Forum B*, 3(November 2003), 275–293.
- Tracy, D. (1977). Revisionist practical theology and the meaning of public discourse. *Pastoral Psychology*, 26(2), 83–94. <https://doi.org/10.1007/BF01759804>
- Tracy, D. (1981). *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism*. The Crossroad Publishing Company 575 Lexington Avenue.
- Wilfred, F. (2020). Asian Theological Ferment (For Doing Theology in Contemporary Indonesia: Interdisciplinary Perspectives). *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 1(2), 73–90. <https://doi.org/10.47043/ijipth.v1i2.11>
- Yuliantari, A. P., Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2020). Manggarai People's Perspective on Migration: A Study of Popular Manggarai Songs' Lyrics. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15681>